



Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Angelina Rizza Aprillia¹, Wiwik Handayani²

^{1,2}Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Korespondensi Penulis: angelinarizza.aprillia@gmail.com

Abstract. *Poverty is a complex issue that goes beyond just money. It also involves social, political, and how institutions work. Villages, being the smallest level of government, are important in helping people live better lives through good leadership and management. This study looks at how village management helps reduce poverty by giving communities more power and control. To do this, the research used information from recent scientific articles and also studied a real example from Panggungharjo Village in Bantul Regency. The findings show that when villages are open, honest, involve everyone, and work well, it helps empower people and cut down poverty. Village-run businesses, called BUMDes, are especially helpful in getting people involved in making money. Empowering communities using their own strengths and with good management creates a lasting path to growth. The study concludes that strong village leadership is key to improving lives and reducing poverty in local areas. These results show that making local institutions stronger, making sure people are held accountable, and involving more community members can make policies work better in villages. In practice, this means social programs can reach the right people more effectively, local businesses can grow in a lasting way, and governments can work together with villagers to create fair development and reduce poverty over time around the world.*

Keywords *village governance, poverty, community empowerment, BUMDes, good governance.*

Abstrak. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan keuangan, tetapi juga melibatkan aspek sosial, politik, dan sistem kelembagaan. Desa, sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga melalui pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran tata kelola pemerintahan desa dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan pendekatan memperkuat peran masyarakat. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan menganalisis berbagai penelitian dan jurnal ilmiah selama lima tahun terakhir, termasuk studi di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang menerapkan prinsip transparan, bertanggung jawab, melibatkan masyarakat, dan efektif secara langsung memengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan pengurangan. Institusi ekonomi desa seperti BUMDes menjadi alat efektif yang mendorong partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi produktif. Pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada potensi lokal dan didukung oleh tata kelola yang baik menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini menekankan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah fondasi utama dalam keberhasilan pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan di tingkat daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa memperkuat lembaga-lembaga lokal, memastikan pertanggungjawaban masyarakat, dan melibatkan lebih banyak anggota masyarakat dapat membuat kebijakan bekerja lebih baik di desa-desa. Dalam praktiknya, ini berarti program-program sosial dapat menjangkau orang yang tepat secara lebih efektif, bisnis lokal dapat tumbuh secara berkelanjutan, dan pemerintah dapat bekerja sama dengan penduduk desa untuk menciptakan pembangunan yang adil dan mengurangi kemiskinan dari waktu ke waktu di seluruh dunia.

Kata kunci: Tata Kelola Pemerintahan Desa, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, BUMDes, Good Governance.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu penting dalam upaya pembangunan nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,36%, dengan sebagian besar warga miskin berada di daerah pedesaan (Anam et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di desa memiliki ciri khas tersendiri yang membutuhkan pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan memanfaatkan potensi local (World Bank, 2020).

Desa merupakan pusat utama pembangunan karena memiliki hubungan langsung dengan masyarakat dan sumber daya setempat (World Bank, 2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Di bawah kerangka ini, pemerintah desa menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (F. Putra, 2023). Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa banyak desa masih menghadapi masalah dalam pengelolaan tata Kelola (Wargadinata & Sartika, 2019). Tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya akuntabilitas, serta kurangnya partisipasi masyarakat sering kali menghambat efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan (Wargadinata & Sartika, 2019).

Pemerintah Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi contoh sukses dalam penerapan tata kelola pemerintahan desa (Sudrajat et al., 2020). Melalui BUMDes Panggung Lestari, desa ini berhasil mengembangkan berbagai usaha produktif seperti pengelolaan sampah (KUPAS), wisata edukasi Kampong Mataraman, dan pengolahan minyak jelantah (R-UCO) (Ikhwansyah et al., 2020). Model ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah desa, lembaga lokal, dan masyarakat dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan (Anam et al., 2023).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintahan desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui tinjauan literatur dari berbagai jurnal ilmiah lima tahun terakhir (World Bank, 2020). Penelitian ini mencoba mengidentifikasi hubungan konseptual antara tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (I. M. A. W. W. Putra & Huda, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Grand theory: Teori Kebijakan Sosial - kerangka makro untuk penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan sosial sebagai dasar konseptual utama untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta desa di tingkat paling bawah bertanggung jawab dalam merancang mekanisme redistributif dan program perlindungan sosial. Tujuan dari program-program ini adalah mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan (Mikea Manitra et al., 2023). Menurut teori kebijakan sosial, kemiskinan bukanlah kesalahan individu, melainkan akibat dari kelemahan struktur dan sistem alokasi sumber daya sosial dan ekonomi yang membutuhkan intervensi pemerintah secara terencana. Dalam kerangka ini, berbagai program seperti PKH, BPNT, BLT dana desa, serta aturan dan

alat fiskal lainnya dianggap sebagai langkah pemerintah untuk memastikan standar kesejahteraan minimum dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Pandangan Midgley mengenai pembangunan sosial dan intervensi sosial mendukung pendekatan ini, yaitu kebijakan harus menggabungkan aspek ekonomi dan sosial agar pembangunan bisa memberi manfaat kepada kelompok yang paling rentan (Midgley, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di Indramayu, informan menyebutkan bahwa program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT-DD adalah alat utama yang digunakan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Hal ini mendukung pandangan kebijakan sosial bahwa pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi redistribusi kekayaan (Imawan & Purwanto, 2020).

Middle theory: Teori Intervensi Sosial / Social Intervention - jembatan antara kebijakan dan praktik implementasi.

Penelitian ini berada di antara teori besar (kebijakan makro) dan fenomena kecil (mikro), menggunakan teori intervensi sosial sebagai teori menengah yang menjelaskan bagaimana kebijakan sosial diterapkan di tingkat local (Saleh & Mujahiddin, 2020). Dalam literatur pengembangan sosial dan intervensi sosial, intervensi yang efektif tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga merancang kegiatan yang memperkuat kemampuan lokal, meningkatkan organisasi, dan mekanisme partisipasi masyarakat sehingga intervensi bisa berlangsung terus-menerus (Umi Farida, 2022). Menurut Midgley dan literatur pengembangan sosial, intervensi harus bersifat holistic menggabungkan perlindungan sementara dengan pembangunan kapasitas jangka Panjang agar tidak menciptakan ketergantungan (Saleh & Mujahiddin, 2020). Literatur sistemik dan pendekatan intervensi juga menekankan pentingnya keterlibatan banyak pihak seperti pemerintah desa, dinas sosial, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta/CSR dalam merancang paket intervensi (Umi Farida, 2022). Sumber referensi tentang intervensi sosial dan pengembangan sosial tersedia dalam beberapa dokumen PDF yang menjelaskan teori ini secara lengkap (Midgley, 2013).

Hasil wawancara di Indramayu menunjukkan pola intervensi ganda: di satu sisi, bantuan langsung seperti PKH dan BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran, dan di sisi lain berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan pertanian, akses modal, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan CSR, yang bertujuan sebagai intervensi jangka menengah maupun pendanaan kapabilitas (Mikea Manitra et al., 2023). Namun, informan juga mengakui adanya masalah koordinasi dan kecenderungan ketergantungan; ini adalah masalah yang umum dan

tepat dijelaskan oleh teori intervensi sosial, yaitu desain intervensi menentukan apakah intervensi itu menghasilkan perubahan atau justru memperkuat ketergantungan (Umi Farida, 2022).

Applied Theories - teori-teori yang diaplikasikan (dipilih berdasar bukti wawancara)

Berdasarkan pola empiris dari file wawancara Anda, seperti ketergantungan pada bantuan sosial, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pendidikan, pentingnya jaringan lokal, tokoh, atau kelompok, peran sektor informal, serta upaya digitalisasi, saya memilih tiga teori yang paling cocok untuk menjelaskan dinamika lokal dan digunakan dalam analisis Anda.

Teori Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Theory) - fokus pada kapasitas, akses sumber daya, dan kontrol lokal.

Teori pemberdayaan menekankan bahwa untuk mengatasi kemiskinan, perlu membangun kemampuan komunitas agar mereka bisa mengakses, mengelola, dan menggunakan sumber daya lokal demi kesejahteraan mereka sendiri (Yunus Winoto dan Tine Silvana Rachmawati, 2017). Dari hasil wawancara di Indramayu, terlihat bahwa beberapa intervensi pemberdayaan seperti pelatihan pertanian, pemberian modal, bimbingan kampus, dan CSR perusahaan sudah diterapkan (Umi Farida, 2022). Namun, ada tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan budaya konsumtif yang mengurangi dampak jangka Panjang (Saleh & Mujahiddin, 2020). Oleh karena itu, dalam menganalisis literatur, harus mengevaluasi berbagai aspek pemberdayaan apakah hanya transfer sumber daya atau juga meningkatkan kemampuan dalam manajemen, pemasaran, serta membangun jaringan pasar sesuai dengan prinsip teori pemberdayaan (Isnaini et al., 2023).

Teori Ketergantungan / Dependency (Dependency Theory, pada tingkat mikro kebijakan) - memperingatkan risiko dependency syndrome

Meskipun teori ketergantungan biasanya digunakan untuk menganalisis hal makro (hubungan antara pusat dan daerah), versi mikro atau berdasarkan kebijakan dari teori ini bisa menjelaskan fenomena ketergantungan pada bantuan sosial yang sudah ditemukan dalam wawancara Anda (Mikea Manitra et al., 2023). Informan menyebut adanya peningkatan ketergantungan keluarga terhadap program PKH, BPNT, dan BLT-DD; teori ketergantungan menegaskan bahwa intervensi yang tidak dilengkapi dengan strategi pemberdayaan struktural justru bisa membuat masyarakat tetap rentan (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Karena itu, analisis harus memeriksa apakah program bantuan di Indramayu dilengkapi dengan strategi keluar, kondisi pemberdayaan, atau justru memperkuat ketergantungan (Adesina, 2017).

Teori Modal Sosial (Social Capital Theory) - jaringan, kepercayaan, norma & kemampuan kolektif.

Wawancara menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat, tokoh agama, gotong-royong, serta mekanisme informal seperti sektor informal dan kelompok nelayan sangat penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga miskin (Kesuma & Saputri, 2020). Teori modal sosial menurut Putnam dan Coleman menjelaskan bahwa jaringan formal maupun informal, norma, serta kepercayaan antar warga bisa meningkatkan kemampuan kolektif dalam mendapatkan bantuan, berbagi informasi, dan melakukan tindakan bersama yang berdampak positif (F. Putra, 2023). Dalam pengelolaan tata kelola desa, pemerintah desa dapat memperkuat modal sosial dengan cara membentuk forum partisipatif, memberikan pendampingan kepada kelompok, serta memperkuat lembaga lokal seperti koperasi, kelompok tani, dan BUMDes yang mampu memberdayakan masyarakat (I. M. A. W. W. Putra & Huda, 2022).

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa adalah cara-cara, langkah-langkah, dan hubungan antara lembaga desa, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam mengelola dan mengembangkan kehidupan desa secara local (Collins et al., 2021). Prinsip tata kelola yang baik, menurut UNDP tahun 1997, mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan penerapan hukum (Prantika & Oktari, 2025). Dalam konteks desa, tata kelola yang baik berarti setiap kebijakan dan program harus dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat, dan bertanggung jawab (Firanti & Biduri, 2024).

Menurut Putwi & Nurhadi (2024), penerapan tata kelola yang baik di Desa Panggungharjo berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menarik partisipasi masyarakat. Desa tersebut menerapkan sistem administrasi yang jelas, mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka, serta melibatkan warga dalam pengambilan keputusan melalui forum Musrenbangdes. Penelitian oleh Sastika & Mayasiana (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola desa juga bergantung pada kemampuan kepala desa dalam memimpin aparatur dan masyarakat bekerja sama mencapai tujuan pembangunan. Kepemimpinan yang partisipatif, terbuka, dan mendorong inovasi menjadi faktor penting dalam pengelolaan desa yang berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat adalah cara pengembangan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk hidup mandiri secara ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan adalah proses yang meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok untuk

mengelola sumber daya, membuat keputusan, serta memilih sesuatu yang memengaruhi hidup mereka. Dalam konteks pengembangan desa, pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, pembentukan lembaga lokal, dan bantuan modal usaha (Sahgal, 2024). Harjanta (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya meningkatkan penghasilan warga tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan partisipasi bersama. Pemberdayaan juga berkaitan dengan peningkatan pemahaman tentang ekonomi dan kemampuan berwirausaha. Penelitian oleh Hadi et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan program BUMDes sangat tergantung pada kemampuan masyarakat memahami manajemen dan pemasaran produk local (D & Ansori, 2022). Dengan demikian, pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan gabungan antara pelatihan, bimbingan, serta dukungan lembaga yang kuat (Khairani et al., 2021).

Peran BUMDes dalam Tata Kelola Ekonomi Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bentuk lembaga ekonomi inovatif yang bertujuan mengelola potensi lokal secara produktif (Kushartono et al., 2023). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli desa (Mulianingsih, 2022). Harjanta (2020) menjelaskan bahwa BUMDes Panggung Lestari memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan pendapatan warga miskin di Panggunharjo. BUMDes ini menerapkan prinsip bisnis sosial yang tidak hanya menekankan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosialnya (Widiastuti et al., 2025). BUMDes juga menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel (Hadi et al., 2024). Studi oleh Pakudu (2024) menunjukkan bahwa BUMDes yang dikelola dengan prinsip partisipatif lebih efektif dalam mendorong perekonomian desa karena masyarakat merasa memiliki dan terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi .

Hubungan antara Tata Kelola, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan

Pemerintahan desa yang baik serta pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengurangan kemiskinan (Arisa Adiyanti et al., 2025). Pemerintahan desa yang transparan dan melibatkan masyarakat secara aktif akan memberikan kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Larisu & Jopang, 2022). Partisipasi masyarakat ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka (F. Putra, 2023). Partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan desa meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan (Mirnawati, Sudarman Mersa, Wahyu Widodo, 2022). Desa dengan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan desa yang menggunakan sistem birokrasi tertutup (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Model pengelolaan desa yang terpadu dan berbasis pemberdayaan dapat dijelaskan dalam tiga tahapan: pertama, pemerintahan desa yang baik menciptakan kepercayaan sosial, kedua, kepercayaan sosial mendorong partisipasi masyarakat, dan ketiga, partisipasi tersebut menghasilkan kegiatan ekonomi yang produktif sehingga mengurangi kemiskinan (Hadi et al., 2024). Dengan demikian, pemerintahan yang baik bukan hanya sekadar konsep administratif, tetapi juga merupakan strategi sosial-ekonomi yang efektif (Pakudu, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literatur (Imawan & Purwanto, 2020). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas, yaitu tata kelola pemerintahan desa dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, merupakan isu yang sudah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya di Indonesia, baik melalui penelitian lapangan maupun analisis kebijakan (I. M. A. W. W. Putra & Huda, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak mengumpulkan data baru di lapangan, melainkan menganalisis dan menelaah hasil penelitian yang sudah ada secara mendalam (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai penemuan agar terbentuk pemahaman yang lebih lengkap tentang peran tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam menurunkan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat (World Bank, 2020).

Metode literatur memungkinkan peneliti untuk mengenali pola, tema, dan hubungan antar konsep yang terdapat dalam literatur yang relevan (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat bagaimana teori good governance dan pemberdayaan masyarakat diterapkan dalam konteks pemerintahan desa (Wargadinata & Sartika, 2019). Dengan mengkaji beberapa hasil penelitian dalam lima tahun terakhir (2019–2024), penelitian ini berusaha memetakan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik terkini mengenai tata kelola pemerintahan desa di Indonesia (Anam et al., 2023). Pemilihan waktu ini didasarkan pada perubahan penting yang terjadi dalam penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (World Bank, 2020).

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang menekankan pemahaman terhadap makna dan konteks sosial di balik fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan desa tidak hanya ditafsirkan sebagai sistem administratif, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan partisipasi, interaksi, serta dinamika kekuasaan antara pemerintah desa dan masyarakat (I. M. A. W. W. Putra & Huda, 2022). Oleh karena itu, data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan menekankan makna, nilai, serta prinsip yang terkandung di dalamnya. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan analisis yang lebih fleksibel terhadap berbagai konteks desa di Indonesia, karena setiap desa memiliki karakteristik, kapasitas kelembagaan, serta potensi lokal yang berbeda (Anam et al., 2023).

Sebelum memulai penelitian, peneliti menetapkan rumusan masalah utama yaitu bagaimana tata kelola pemerintahan desa berperan dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat (World Bank, 2020). Dari rumusan masalah tersebut, peneliti menurunkan fokus analisis ke beberapa aspek utama, yaitu penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, mekanisme pemberdayaan masyarakat, serta kontribusi kelembagaan desa seperti BUMDes terhadap pengentasan kemiskinan (Wargadinata & Sartika, 2019). Setiap aspek dianalisis dengan merujuk pada hasil penelitian empiris di berbagai daerah, terutama yang memiliki karakteristik serupa dengan Desa Panggungharjo, Bantul, sebagai contoh studi kasus keberhasilan (Ikhwansyah et al., 2020).

Pemilihan metode tinjauan pustaka dalam penelitian ini juga didasari oleh pertimbangan mengenai efisiensi dan keakuratan dalam menganalisis isu-isu terkait kebijakan public (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Banyak penelitian di lapangan terkait desa bersifat lokal dan kontekstual, sehingga untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam, diperlukan analisis yang mencakup berbagai studi (Anam et al., 2023). Karenanya, dengan mempelajari berbagai jurnal ilmiah dari tingkat nasional hingga internasional, penelitian ini berupaya menyusun argumen yang lebih kuat mengenai pentingnya pengelolaan pemerintahan desa yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama dalam mengatasi kemiskinan (F. Putra, 2023). Dengan desain penelitian seperti ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi tentang pemerintahan desa (Ikhwansyah et al., 2020). Secara praktis, desain ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa, lembaga

pemberdayaan masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, untuk meningkatkan pengelolaan dan memperkuat strategi pengentasan kemiskinan berbasis kemandirian lokal.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari berbagai publikasi ilmiah dan dokumen resmi yang relevan dengan topik yang dibahas (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Data sekunder dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan pustaka, berfokus pada analisis konseptual dan hasil penelitian sebelumnya untuk memahami lebih dalam hubungan antara tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan (F. Putra, 2023). Sumber utama data berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terakreditasi, laporan resmi dari lembaga pemerintahan desa, serta dokumen kebijakan terkait tata kelola dan pembangunan desa (Yunus Winoto dan Tine Silvana Rachmawati, 2017). Beberapa referensi utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini antara lain karya (Harjanta, 2020) yang membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta penelitian (Putwi & Nurhadi, 2024) yang menganalisis strategi peningkatan pendapatan desa melalui tata kelola pemerintahan Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul.

Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik tata kelola pemerintahan desa yang berhasil mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga (Fitriani et al., 2014). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber tambahan dari jurnal ilmiah lima tahun terakhir (2019–2024) yang didapatkan melalui pencarian di database akademik seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan Scopus. Artikel-artikel tersebut mencakup studi yang relevan terkait tata kelola desa yang baik (*good village governance*), pemberdayaan masyarakat desa, serta upaya pengentasan kemiskinan melalui lembaga ekonomi lokal seperti BUMDes (Manda & Juliansa, 2024). Contohnya, artikel dari Anggun dan Mayasiana (2023) membahas strategi pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes, sedangkan Hadi et al. (2024) menyoroti hubungan antara tata kelola kelembagaan desa dan pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pemberdayaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi dan studi literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Proses dimulai dengan mencari artikel dan jurnal penelitian melalui beberapa basis data akademik online seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan

Scopus. Kata kunci yang digunakan meliputi “tata kelola pemerintahan desa”, “pemberdayaan masyarakat desa”, “BUMDes dan kemiskinan”, serta “village governance and poverty alleviation in Indonesia” (F. Putra, 2023). Setiap hasil pencarian kemudian disaring berdasarkan kriteria tertentu agar hanya sumber yang memenuhi standar akademik dan relevan dengan tema penelitian yang diikutsertakan dalam analisis. Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti tahun diterbitkan, reputasi jurnal, dan keterkaitan langsung dengan topik penelitian (Umi Farida, 2022). Literatur yang digunakan sebagian besar berasal dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi (SINTA 2–5) dan jurnal internasional open access yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, yaitu periode 2019 hingga 2024 (Anam et al., 2023). Hal ini bertujuan untuk memastikan kebaruan (recency) dan kesesuaian konteks penelitian dengan situasi terkini tata kelola pemerintahan desa di Indonesia (Imawan & Purwanto, 2020).

Setiap artikel yang memenuhi kriteria kemudian dibaca dan dianalisis secara mendalam, dengan fokus pada identifikasi variabel utama, metode penelitian, hasil temuan, dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis (Prasetyani et al., 2023). Proses ini tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup pengkodean dan pengelompokan informasi sesuai dengan tema utama penelitian, yaitu tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan (Nagara & Maulana, 2025). Dengan proses pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur, penelitian mampu menemukan sintesis konseptual yang kuat dan dalam mengenai hubungan antara tata kelola desa, pemberdayaan masyarakat, dan upaya mengurangi kemiskinan di pedesaan Indonesia (Hadi et al., 2024).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan metode tinjauan Pustaka (Imawan & Purwanto, 2020). Proses analisis tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi dari sumber-sumber berbagai literatur, tetapi juga melibatkan proses menelaah, menerjemahkan, dan menggabungkan hasil penelitian yang relevan agar terbentuk pemahaman yang utuh mengenai tata kelola pemerintahan desa dalam upaya menangani kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tahap awal analisis dimulai dengan proses reduksi data, yaitu peneliti melakukan pemilihan secara ketat terhadap literatur yang sudah diperoleh untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian. Setiap artikel, jurnal, maupun laporan kebijakan yang diteliti kemudian dianalisis dari segi konteks, metode, hasil temuan, serta kesimpulan utama (World Bank, 2020). Tujuan dari proses ini adalah

menyaring literatur yang secara nyata menjelaskan hubungan antara tata kelola pemerintahan desa, praktik pemberdayaan masyarakat, dan dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan di tingkat lokal. Setelah dilakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian atau tampilan data.

Dengan cara ini, data yang awalnya terpisah dari sumber-sumber masing-masing dapat diintegrasikan ke dalam struktur konseptual yang terpadu (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Tahap terakhir adalah interpretasi dan sintesis data. Di fase ini, peneliti menafsirkan hasil temuan dari berbagai literatur secara kritis dengan menghubungkannya ke dalam konteks sosial, ekonomi, dan lembaga pemerintahan desa di Indonesia (Agusta & Khoirunurrofik, 2024). Sintesis dilakukan untuk mengungkap pola umum serta perbedaan pandangan antar peneliti sehingga diperoleh pemahaman lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan desa dalam pengentasan kemiskinan. Proses sintesis ini bersifat sintesis naratif, yaitu menggabungkan temuan empiris dan teoritis dari berbagai penelitian menjadi rangkaian argumen yang konsisten dan logis (Anam et al., 2023). Seluruh tahapan analisis dilakukan secara berulang dan reflektif, sehingga hasil akhir yang diperoleh bukan hanya sekadar rangkuman dari berbagai studi, tetapi juga interpretasi kritis atas makna di balik data yang ada. Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian ini tidak hanya untuk menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga untuk membangun kerangka konseptual yang mampu menjelaskan hubungan antara tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan secara mendalam (Wargadinata & Sartika, 2019).

Validitas dan Keandalan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan tinjauan literatur, validitas dan keandalan data sangat penting karena menjadi dasar untuk mempercayai hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh. Berbeda dengan penelitian lapangan, penelitian berbasis literatur bergantung pada data sekunder dari berbagai publikasi ilmiah, dokumen resmi, serta hasil kajian akademik (Imawan & Purwanto, 2020). Karenanya, untuk memastikan validitas, peneliti tidak hanya melakukan pengecekan isi, tetapi juga memilih sumber data secara ketat berdasarkan kualitas dan relevansinya.

Dalam penelitian ini, validitas merujuk pada sejauh mana data dan informasi yang dikumpulkan benar-benar bisa menggambarkan kondisi tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Untuk menjaga validitas tersebut, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur

yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi, publikasi internasional yang di-review oleh rekan sejawat (World Bank, 2020). Triangulasi dilakukan dengan menganalisis kesamaan dan perbedaan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola yang konsisten. Misalnya, penelitian Harjanta (2020) yang membahas peran BUMDes dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan dengan penelitian (Pakudu, 2024) yang memfokuskan pada efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa. Kesamaan dalam temuan dari berbagai sumber tersebut memperkuat validitas internal penelitian ini.

Secara keseluruhan, proses validasi dan pengujian keandalan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki integritas yang tinggi, baik dari segi sumber maupun keakuratannya, serta relevansi terhadap konteks tata kelola desa secara empiris. Pendekatan metodologis yang terstruktur dan sistematis ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya sedikit deskriptif, tetapi juga memiliki bobot akademik yang kuat, dapat dipercaya, dan relevan sebagai rujukan dalam pengembangan kebijakan maupun penelitian lanjutan di bidang tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (S

Kerangka Tata Kelola: Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas

Penelitian ini menempatkan tata kelola sebagai faktor kunci dalam efektivitas strategi pengentasan kemiskinan, terutama ketika pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi instrumen utama pembangunan desa (Wargadinata & Sartika, 2019). Dalam konteks Desa Panggungharjo, praktik transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (TPA) menjadi kerangka analitis untuk menilai bagaimana sumber daya desa—termasuk Dana Desa dan unit usaha BUMDes dikelola serta diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan warga (Sudrajat et al., 2020). Transparansi dimaknai sebagai sejauh mana informasi publik seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), serta laporan kinerja BUMDes dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui kanal informasi daring maupun media sosial resmi desa (I. M. A. W. W. Putra & Huda, 2022).

Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan pembangunan desa, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, perencanaan prioritas program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil melalui musyawarah desa, forum RT/RW, serta kelompok dampingan tematik. Partisipasi ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat (Umi Farida, 2022).

Akuntabilitas meliputi mekanisme pertanggungjawaban baik secara vertical kepada regulator dan lembaga pengawas—maupun secara horizontal kepada masyarakat desa (Wargadinata & Sartika, 2019). Bentuknya dapat berupa audit sosial, forum umpan balik publik, serta mekanisme aduan yang responsif. Dengan demikian, tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel bukan hanya menciptakan tata kelola yang bersih, tetapi juga memperkuat kepercayaan sosial dan mempercepat pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan berbasis inklusi (Kesuma & Saputri, 2020).

Transparansi Pengelolaan Sumber Daya

Ketersediaan dokumentasi publik yang lengkap dan mudah diakses melalui kanal resmi desa menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola yang transparan (I. M. A. W. W. Putra & Huda, 2022). Di Panggungharjo, publikasi periodik seperti ringkasan APBDes, progres pelaksanaan program, serta laporan unit usaha BUMDes membantu masyarakat menelusuri data sekunder secara lebih mudah dan meningkatkan rasa percaya terhadap pemerintah desa (Panggungharjo, 2018). Praktik transparansi ini memiliki fungsi ganda: pertama, mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan warga; kedua, meningkatkan disiplin internal aparatur desa karena setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipantau publik; dan ketiga, menjadi dasar bagi audit sosial yang dilakukan oleh masyarakat (F. Putra, 2023). Temuan ini sejalan dengan literatur tata kelola desa yang menunjukkan bahwa keterbukaan data berkontribusi pada penurunan inefisiensi dan risiko salah sasaran program (Wargadinata & Sartika, 2019).

Transparansi yang dijalankan secara konsisten mampu menurunkan biaya koordinasi antar pemangku kepentingan, mempercepat koreksi kebijakan berbasis data, serta memperkuat legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan (I. M. A. W. W. Putra & Huda, 2022). Selain itu, publikasi informasi yang disajikan dalam format ramah-baca seperti infografik APBDes, dashboard realisasi anggaran, dan katalog program social meningkatkan literasi warga mengenai prioritas belanja desa dan memperluas akses terhadap kanal pengaduan public (Saleh & Mujahiddin, 2020). Dengan demikian, transparansi bukan hanya aspek administratif, tetapi juga sarana pemberdayaan warga agar lebih kritis dan partisipatif dalam proses pembangunan.

Partisipasi Bermakna dalam Siklus Program

Partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembangunan desa tidak hanya diukur dari jumlah warga yang hadir dalam musyawarah, tetapi juga dari sejauh mana keterlibatan mereka sejak tahap identifikasi masalah hingga evaluasi hasil program (I. M.

A. W. W. Putra & Huda, 2022). Di Panggungharjo, partisipasi ini diwujudkan melalui mekanisme kolaboratif antara pemerintah desa dan berbagai kelompok masyarakat seperti UMKM, pengelola sampah, kelompok perempuan, dan pemuda (Ikhwansyah et al., 2020). Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai ko-produsen layanan publik, misalnya dalam pengelolaan bank sampah, kegiatan kewirausahaan sosial, atau inisiatif ekonomi sirkular (Yunus Winoto dan Tine Silvana Rachmawati, 2017). Melalui keterlibatan tersebut, terjadi proses transfer keterampilan, peningkatan kapasitas, serta perluasan jejaring pasar, faktor penting yang mendukung pengentasan kemiskinan berbasis potensi local (Wargadinata & Sartika, 2019).

Implikasi dari partisipasi yang bermakna adalah berkurangnya risiko *elite capture*, karena keputusan strategis desa dan hasil antara (outputs) diawasi oleh berbagai pihak dengan kepentingan dan perspektif yang beragam. Selain itu, kualitas partisipasi dapat diukur dari keberlanjutan kelompok masyarakat yang terlibat serta tingkat inklusivitasnya—apakah mencakup kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan rumah tangga miskin (Saleh & Mujahiddin, 2020). Dengan demikian, partisipasi bukan hanya simbol keterlibatan warga, tetapi menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan desa tersebar secara adil dan berkelanjutan.

Akuntabilitas dan Mekanisme Umpan Balik

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menegaskan tanggung jawab pemerintah desa terhadap standar kinerja, integritas, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya public (Wargadinata & Sartika, 2019). Di Panggungharjo, akuntabilitas dijalankan melalui beragam mekanisme, seperti kanal aduan publik yang terbuka, forum pertanggungjawaban periodik, serta sistem pelaporan yang memungkinkan keterlacakan (*traceability*) setiap aktivitas belanja program, termasuk laporan keuangan BUMDes (Panggungharjo, 2018). Mekanisme ini tidak hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga menciptakan ruang pembelajaran kebijakan (*policy learning*), di mana pemerintah desa dapat menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik warga dan hasil evaluasi (I. M. A. W. W. Putra & Huda, 2022). Dengan adanya sistem umpan balik yang responsif, koreksi terhadap kebijakan baik dalam bentuk *re-targeting* sasaran maupun *re-skilling* pelaku program dapat dilakukan secara dini sebelum menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

Akuntabilitas yang kuat berkontribusi pada tertutupnya celah inefisiensi pengelolaan anggaran, menekan potensi konflik sosial akibat ketidaktepatan sasaran program, serta meningkatkan nilai manfaat Dana Desa (*value for money*) (World Bank, 2020). Selain itu,

keberadaan audit sosial yang difasilitasi oleh pemerintah desa mendorong inovasi pelayanan publik karena aparaturnya merasa terdorong untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang lebih transparan dan adaptif (F. Putra, 2023). Dengan demikian, akuntabilitas bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran kolektif dan katalis inovasi tata kelola desa.

Peran BUMDes Panggung Lestari dalam Pemberdayaan

BUMDes Panggung Lestari merupakan salah satu contoh praktik baik (best practice) dalam tata kelola ekonomi desa yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Unit usaha ini mengelola berbagai lini bisnis, seperti pengelolaan sampah terpadu, usaha lokal berbasis warga, serta penyerapan tenaga kerja produktif. Dari sisi ekonomi, BUMDes Panggung Lestari berperan dalam menciptakan peluang kerja baru, mendorong diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga, dan memperkuat sirkulasi ekonomi lokal. Dampaknya tidak hanya meningkatkan daya beli warga, tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi desa.

Secara sosial, keberadaan BUMDes ini memperkuat jejaring dukungan antarwarga, menumbuhkan kepercayaan diri pelaku usaha mikro, serta meningkatkan literasi kewirausahaan di tingkat akar rumput (Ikhwansyah et al., 2020). Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan membantu warga bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi aktif (Sudrajat et al., 2021). Dari sisi lingkungan, model bisnis yang berbasis pada pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular turut mengurangi volume timbunan sampah dan biaya eksternalitas yang berpotensi membebani rumah tangga, seperti biaya kesehatan dan kebersihan (Sudrajat et al., 2020).

Keberhasilan BUMDes tidak lepas dari potensi risiko (Kesuma & Saputri, 2020). Ketergantungan pada satu atau dua lini usaha dapat menimbulkan kerentanan ekonomi (Panggunharjo, 2018). Risiko ini dapat diminimalkan melalui diversifikasi portofolio usaha dan pembentukan kemitraan pasar yang lebih luas (Mikea Manitra et al., 2023). Sementara itu, risiko tata kelola seperti *moral hazard* atau lemahnya sistem pengawasan diantisipasi dengan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan, pelaksanaan audit rutin, serta pelibatan perwakilan warga dalam komite pengawas (Wargadinata & Sartika, 2019). Dengan langkah mitigasi tersebut, BUMDes Panggung Lestari tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga pembelajaran sosial yang menumbuhkan kepercayaan, transparansi, dan solidaritas ekonomi lokal.

Sinergi Dana Desa dan Program Pemberdayaan

Efektivitas pengentasan kemiskinan meningkat ketika Dana Desa tidak hanya diposisikan sebagai sumber pendanaan utama, tetapi juga sebagai pemicu (*seed fund*) yang menggerakkan partisipasi multipihak (Hermawan, 2019). Di Panggunharjo, Dana Desa dimanfaatkan untuk membiayai tahap awal program seperti pelatihan keterampilan, penyediaan peralatan bersama, dan pendampingan intensif melalui mekanisme *coaching* dan *mentoring* (Imawan & Purwanto, 2020). Setelah tahap inisiasi, keberlanjutan program dijaga melalui kemitraan dengan pemerintah kabupaten, sektor swasta, dan lembaga filantropi, sehingga pembiayaan tidak hanya bergantung pada kas desa (Umi Farida, 2022).

Penajaman sasaran program dilakukan dengan memanfaatkan basis data kesejahteraan by-name/by-address yang memungkinkan identifikasi rumah tangga miskin secara lebih akurat (Mikea Manitra et al., 2023). Penerapan skema insentif berbasis kinerja kelompok juga membantu memastikan bahwa hasil program tidak hanya bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan dan terukur (Hermawan, 2019). Dengan sinergi ini, Dana Desa berfungsi sebagai katalis yang mempertemukan potensi lokal dengan sumber daya eksternal, menciptakan ekosistem pemberdayaan yang produktif dan inklusif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tata kelola berbasis prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (TPA) terbukti menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat desa (Wargadinata & Sartika, 2019). Di Panggunharjo, praktik keterbukaan informasi publik, partisipasi warga yang bermakna, serta akuntabilitas yang responsif mampu memperkecil inefisiensi, mengurangi risiko salah sasaran, dan memperkuat daya ungkit program pemberdayaan masyarakat (Panggunharjo, 2018). Dengan sistem tata kelola yang terbuka dan inklusif, proses pengambilan keputusan menjadi lebih adaptif dan berbasis kebutuhan nyata warga. BUMDes Panggung Lestari memainkan peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan multi-dimensi yang menggabungkan tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Ikhwansyah et al., 2020). Melalui kegiatan seperti pengelolaan sampah terpadu, pengembangan usaha lokal, serta penyerapan tenaga kerja, BUMDes tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas warga dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui penyediaan layanan lingkungan yang efisien. Sinergi antara Dana Desa dan program pemberdayaan terbukti memperbesar dampak pembangunan (Hermawan, 2019). Dana Desa efektif berfungsi sebagai modal awal dan sumber pembiayaan kegiatan pelatihan serta pendampingan, sementara keberlanjutan dan skalabilitas program sangat bergantung pada kemitraan lintas actor melibatkan pemerintah supradesa, sektor swasta,

dan lembaga filantropi serta penerapan tata kelola yang disiplin dan transparan. Meski demikian, tantangan implementasi masih nyata. Keterbatasan dalam ketersediaan data, kapasitas manajerial pelaku usaha mikro, rendahnya inklusivitas bagi kelompok rentan, dan ketahanan fiskal desa terhadap guncangan eksternal menjadi aspek yang memerlukan perhatian serius (F. Putra, 2023). Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis data dan sistem monitoring yang adaptif menjadi kebutuhan mendesak agar praktik baik di Panggungharjo dapat direplikasi secara berkelanjutan di wilayah lain (Mikea Manitra et al., 2023).

Dalam rangka memperkuat tata kelola desa dan meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat, beberapa rekomendasi operasional berikut diajukan. Pertama, penguatan transparansi. Pemerintah desa disarankan membangun *dashboard* digital atau papan informasi interaktif yang memuat ringkasan APBDes, progres fisik dan keuangan program, laporan BUMDes per triwulan, serta *service level agreement* untuk kanal aduan public (Wargadinata & Sartika, 2019). Format publikasi informasi perlu distandardisasi agar ramah bagi warga melalui penyajian infografik dan bahasa yang sederhana, disertai arsip digital (*PDF*) untuk mendukung proses audit social (Panggungharjo, 2018). Kedua, peningkatan kualitas partisipasi. Musyawarah desa (Musdes) sebaiknya dirancang secara tematik dan berbasis data misalnya, mengenai isu kemiskinan, pengembangan UMKM, atau pengelolaan sampah dengan kuota representasi minimal 30 persen perempuan dan keterlibatan kelompok rentan. Skema *co-production* dapat dikembangkan, di mana warga memperoleh insentif berbasis hasil (*output-based incentive*) seperti volume sampah yang terpilah, jam pelatihan yang diselesaikan, atau transaksi UMKM yang berhasil (Umi Farida, 2022). Ketiga, penguatan akuntabilitas dan pengawasan. Desa perlu membentuk Komite Pengawas BUMDes yang terdiri dari unsur pemerintah desa, perwakilan kelompok masyarakat, dan tokoh lokal dengan mandat melakukan audit sederhana setiap triwulan serta mempublikasikan hasilnya secara ringkas (I. M. A. W. W. Putra & Huda, 2022). Selain itu, penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) manajemen risiko meliputi pemetaan risiko usaha, sistem peringatan dini arus kas, dan kebijakan diversifikasi lini usaha perlu ditegakkan untuk memastikan keberlanjutan finansial BUMDes (Wargadinata & Sartika, 2019). Keempat, penguatan kapasitas dan inklusivitas. Program *coaching* dan *mentoring* bagi UMKM perlu dilakukan minimal dua siklus per tahun, mencakup pelatihan pencatatan keuangan sederhana, pemasaran digital, serta standardisasi produk (Yunus Winoto dan Tine Silvana Rachmawati, 2017). Skema afirmatif juga perlu diperkuat untuk kelompok miskin, perempuan kepala keluarga, dan penyandang disabilitas, misalnya melalui prioritas akses ke modal bergulir mikro disertai pendampingan intensif (Ikhwanyah et al.,

2020). Kelima, sistem monitoring dan evaluasi (Monev) adaptif. Pemerintah desa perlu menetapkan data *baseline* dan *endline* bagi kelompok dampingan serta menggunakan panel rumah tangga untuk memantau perubahan pendapatan, aset produktif, dan jam kerja (Mikea Manitra et al., 2023). KPI Desa sebagaimana diusulkan dalam tabel 4.8 perlu dijadikan bagian dari Peraturan Desa tentang Kinerja dan dilaporkan secara berkala. Hasil capaian indikator dapat dihubungkan dengan sistem insentif agar mendorong kinerja aparatur dan kelompok masyarakat secara berkelanjutan (World Bank, 2020).

DAFTAR REFERENSI

- Adesina, J. (2017). *Dialogues on Development. 1*.
- Agusta, F. A., & Khoirunrofik, K. (2024). Does Expenditure Structure Affect Rural Poverty Alleviation in Indonesia? The Role of Village Fund Management. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i1.524>
- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: new policy insight. *Discover Global Society*, 1(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Arisa Adiyanti, Agustina Eka, H., & Heni, R. (2025). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Solusi*, 23(3), 338–355. <https://doi.org/10.26623/slsi.v23i3.11854>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA*. 7, 167–186.
- D, R. S., & Ansori, M. (2022). Peningkatan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bumdes. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 6(4), 480–493. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i4.1016>
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281>
- Fitriani, D. A., Santoso, S., & Hamidah, C. (2014). The Role and Strategy of Village-Owned Enterprises in Conducting Economic Empowerment of Village Communities. *Journal of Small Business Management*, 52(4), 655–677.
- Hadi, S., Marta, A., Amin, R. M., & Febrina, R. (2024). Rural Development in Community Empowerment Through the Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Pembangunan Pedesaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(1), 121–134. <https://doi.org/10.35967/njip.v23i1.702>
- Harjanta, S. (2020). PERAN BUMDES DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS BUMDES PANGGUNG HARJO, BANTUL DAN BUMDES TRIDADI, SLEMAN). *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(2), 143–159.
- Hermawan, E. (2019). Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 1(3), 67–79. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i3.30>
- Ikhwanisyah, I., Afriana, A., Faisal, P., & Trisnamansyah, P. (2020). An empowerment of a village economy: (BUMDES) in Indonesia. *International Journal of Innovation*,

- Creativity and Change*, 12(8), 192–207.
- Imawan, S. A., & Purwanto, E. A. (2020). Governing Village Fund in Indonesia: Is It Erradicating Poverty? *Policy & Governance Review*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i1.169>
- Isnaini, R. N., Yuliati, N., & Ariefianto, L. (2023). *Indonesian Journal of Community Empowerment Strategy Based on Local Potential through the Seed Garden Tourism Village Program in Kediri*. 5(2), 152–160.
- Kesuma, P. T. A., & Saputri, L. L. (2020). Modal Sosial Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(1), 14–23. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1489>
- Khairani, L., Ramlan, R., & Pulungan, D. R. (2021). Economic empowerment based on the strengthening of social capital in the implementation of village-owned enterprises. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(2), 209. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i22021.209-220>
- Kushartono, T., Septiansyah, B., & Munawaroh, S. (2023). Strategy for Developing Village Owned Business Entities (Bumdes) in Improving the Village Economy in Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1562>
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Manda, E., & Juliansa, P. (2024). *Journal of Political and Government Issues Strategi Bumdes Dan Pemerintah Desa Karangagung Dalam*. 2(1), 13–18.
- Midgley, J. (2013). *Social Development : Theory & Development*.
- Midgley, J. (2014). *Social Development : Theory & Practice* (N. Aguilera (ed.)). SAGE Publications Ltd.
- Mikea Manitra, R. R., Devara, H. R., Triyono, T., & Muhammad, F. (2023). Implementation of Village Law as a Tool for Poverty Alleviation: in-depth Perspective of Lerep Tourism Village. *SSRN Electronic Journal*, 2(April), 1–19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4539748>
- Mirnowati, Sudarman Mersa, Wahyu Widodo, S. S. (2022). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan*. 6, 11434–11440.
- Mulianingsih, S. (2022). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENDUKUNG PENGENTASAN KEMISKINAN DESA. *Jurnal Registratie*, 4(1), 10–21. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i1.2405>
- Nagara, & Maulana. (2025). *Structuring and Strengthening Village Resilience: A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance System Strukturasi dan Penguatan Ketahanan Desa: Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik*. 7(1), 150–179.
- Pakudu, R. (2024). Community Empowerment in Gorontalo Regency: Adopting the Perspective of Sustainable Livelihoods in Village Fund Allocation. *Journal of Governance*, 9(4), 680–698.
- Panggunharjo, D. (2018). *Profil Desa Panggung*.
- Prantika, S. A., & Oktari, V. (2025). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 215–219. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i3.117>
- Prasetyani, D., Destiningsih, R., & Rosalia, A. C. T. (2023). Community-Based Empowerment: Semi-Systematic Literature Review (SSLR). *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 213–222. <https://doi.org/10.12928/optimum.v12i2.6541>
- Putra, F. (2023). *Village Governance and Public Participation in Indonesia Fadillah*. 2(4), 31–

- 41.
- Putra, I. M. A. W. W., & Huda, M. N. (2022). Implementasi Good Village Governance dalam Pengembangan Industri Pariwisata. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(2), 145–160. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i2.365>
- Putwi, N. S., & Nurhadi. (2024). STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA PEMERINTAH DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Enersia Publika*, 5(2), 474–489.
- Sahgal, A. (2024). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Local Economic Empowerment: Analysis and Recommendations. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Saleh, A., & Mujahiddin, M. (2020). Challenges and Opportunities for Community Empowerment Practices in Indonesia during the Covid-19 Pandemic through Strengthening the Role of Higher Education. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1105–1113. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.946>
- Sastika, H. A., & Mayasiana, N. A. (2024). Village Government Strategy in Community Economic Empowerment through Village-Owned Enterprise Program. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 05(02), 1–12.
- Sudrajat, D., Syadikah, & Suwarjo. (2020). Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597–602.
- Sudrajat, D., Syakdiah, S., & Suwarjo, S. (2021). PERAN BUMDes PANGGUNG LESTARI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PANGGUNG HARJO, SEWON, BANTUL. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(2), 70–91. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v2i2.960>
- Umi Farida, M. K. Q. (2022). Community Empowerment Program in Indonesia. *γ787*, 2(8.5.2017), 2003–2005.
- Wargadinata, E. L., & Sartika, I. (2019). the Good Governance Implementation At Village Level in East Nusa Tenggara Province. *Sosiohumaniora*, 21(3), 323–332. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22120>
- Widiastuti, A., Saputri, A., Riani, L. P., Mulyani, E., & Samsudin, N. (2025). The Implementation of Social Entrepreneurship Values in Village-Owned Enterprise (BUMDes): Is it favorable? *Jurnal Economia*, 21(1), 157–169. <https://doi.org/10.21831/economia.v21i1.79634>
- World Bank. (2020). *Indonesian Village Governance under the new Village Law (2015-2018)*. May, 1–54.
- Yunus Winoto dan Tine Silvana Rachmawati. (2017). *Pengabdian Taman Baca*. 199–208. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/199-208>
- Adesina, J. (2017). *Dialogues on Development*. 1.
- Agusta, F. A., & Khoirunurrofik, K. (2024). Does Expenditure Structure Affect Rural Poverty Alleviation in Indonesia? The Role of Village Fund Management. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i1.524>
- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: new policy insight. *Discover Global Society*, 1(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Arisa Adiyanti, Agustina Eka, H., & Heni, R. (2025). Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Solusi*, 23(3), 338–355. <https://doi.org/10.26623/slsi.v23i3.11854>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA*

- PEMERINTAHAN DESA*. 7, 167–186.
- D, R. S., & Ansori, M. (2022). Peningkatan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bumdes. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 6(4), 480–493. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i4.1016>
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281>
- Fitriani, D. A., Santoso, S., & Hamidah, C. (2014). The Role and Strategy of Village-Owned Enterprises in Conducting Economic Empowerment of Village Communities. *Journal of Small Business Management*, 52(4), 655–677.
- Hadi, S., Marta, A., Amin, R. M., & Febrina, R. (2024). Rural Development in Community Empowerment Through the Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Pembangunan Pedesaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(1), 121–134. <https://doi.org/10.35967/njip.v23i1.702>
- Harjanta, S. (2020). PERAN BUMDES DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS BUMDES PANGGUNG HARJO, BANTUL DAN BUMDES TRIDADI, SLEMAN). *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(2), 143–159.
- Hermawan, E. (2019). Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 1(3), 67–79. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i3.30>
- Ikhwanasyah, I., Afriana, A., Faisal, P., & Trisnamansyah, P. (2020). An empowerment of a village economy: (BUMDES) in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(8), 192–207.
- Imawan, S. A., & Purwanto, E. A. (2020). Governing Village Fund in Indonesia: Is It Erradicating Poverty? *Policy & Governance Review*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i1.169>
- Isnaini, R. N., Yuliati, N., & Ariefianto, L. (2023). *Indonesian Journal of Community Empowerment Strategy Based on Local Potential through the Seed Garden Tourism Village Program in Kediri*. 5(2), 152–160.
- Kesuma, P. T. A., & Saputri, L. L. (2020). Modal Sosial Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(1), 14–23. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1489>
- Khairani, L., Ramlan, R., & Pulungan, D. R. (2021). Economic empowerment based on the strengthening of social capital in the implementation of village-owned enterprises. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(2), 209. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i22021.209-220>
- Kushartono, T., Septiansyah, B., & Munawaroh, S. (2023). Strategy for Developing Village Owned Business Entities (Bumdes) in Improving the Village Economy in Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1562>
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Manda, E., & Juliansa, P. (2024). *Journal of Political and Government Issues Strategi Bumdes Dan Pemerintah Desa Karangagung Dalam*. 2(1), 13–18.
- Midgley, J. (2013). *Social Development : Theory & Development*.
- Midgley, J. (2014). *Social Development : Theory & Practice* (N. Aguilera (ed.)). SAGE

- Publications Ltd.
- Mikea Manitra, R. R., Devara, H. R., Triyono, T., & Muhammad, F. (2023). Implementation of Village Law as a Tool for Poverty Alleviation: in-depth Perspective of Lerep Tourism Village. *SSRN Electronic Journal*, 2(April), 1–19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4539748>
- Mirnawati, Sudarman Mersa, Wahyu Widodo, S. S. (2022). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan*. 6, 11434–11440.
- Mulianingsih, S. (2022). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENDUKUNG PENGENTASAN KEMISKINAN DESA. *Jurnal Registratie*, 4(1), 10–21. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i1.2405>
- Nagara, & Maulana. (2025). *Structuring and Strengthening Village Resilience: A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance System Strukturasi dan Penguatan Ketahanan Desa: Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik*. 7(1), 150–179.
- Pakudu, R. (2024). Community Empowerment in Gorontalo Regency: Adopting the Perspective of Sustainable Livelihoods in Village Fund Allocation. *Journal of Governance*, 9(4), 680–698.
- Panggunharjo, D. (2018). *Profil Desa Panggung*.
- Prantika, S. A., & Oktari, V. (2025). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 215–219. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i3.117>
- Prasetyani, D., Destiningsih, R., & Rosalia, A. C. T. (2023). Community-Based Empowerment: Semi-Systematic Literature Review (SSLR). *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 213–222. <https://doi.org/10.12928/optimum.v12i2.6541>
- Putra, F. (2023). *Village Governance and Public Participation in Indonesia Fadillah*. 2(4), 31–41.
- Putra, I. M. A. W. W., & Huda, M. N. (2022). Implementasi Good Village Governance dalam Pengembangan Industri Pariwisata. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(2), 145–160. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i2.365>
- Putwi, N. S., & Nurhadi. (2024). STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Enersia Publika*, 5(2), 474–489.
- Sahgal, A. (2024). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Local Economic Empowerment: Analysis and Recommendations. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Saleh, A., & Mujahiddin, M. (2020). Challenges and Opportunities for Community Empowerment Practices in Indonesia during the Covid-19 Pandemic through Strengthening the Role of Higher Education. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1105–1113. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.946>
- Sastika, H. A., & Mayasiana, N. A. (2024). Village Government Strategy in Community Economic Empowerment through Village-Owned Enterprise Program. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 05(02), 1–12.
- Sudrajat, D., Syadikah, & Suwarjo. (2020). Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597–602.
- Sudrajat, D., Syakdiah, S., & Suwarjo, S. (2021). PERAN BUMDes PANGGUNG LESTARI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(2), 70–91. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v2i2.960>
- Umi Farida, M. K. Q. (2022). Community Empowerment Program in Indonesia. *γ787*, 2(8.5.2017), 2003–2005.

- Wargadinata, E. L., & Sartika, I. (2019). the Good Governance Implementation At Village Level in East Nusa Tenggara Province. *Sosiohumaniora*, 21(3), 323–332. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22120>
- Widiastuti, A., Saputri, A., Riani, L. P., Mulyani, E., & Samsudin, N. (2025). The Implementation of Social Entrepreneurship Values in Village-Owned Enterprise (BUMDes): Is it favorable? *Jurnal Economia*, 21(1), 157–169. <https://doi.org/10.21831/economia.v21i1.79634>
- World Bank. (2020). *Indonesian Village Governance under the new Village Law (2015-2018)*. May, 1–54.
- Yunus Winoto dan Tine Silvana Rachmawati. (2017). *Pengabdian Taman Baca*. 199–208. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/199-208>